

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI PARIWISATA BUDAYA BARAPAN KEBO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Indra Karsyah¹, Zulkieflimansyah^{2*}, dan Ahmad Yamin³

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Corresponding author: zulkieflimansyah@uts.ac.id

ABSTRAK

Barapan kebo sangat unik dan menarik maka layak untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata untuk menarik wisata untuk datang dan menyaksikan acara tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapat daerah melalui sektor pariwisata. tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk medeskripsikan Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Budaya Barapan Kebo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, 2) Untuk medeskripsikan Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Budaya Barapan Kebo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan informan kunci seperti Kepala dinas Pariwisata, Sekretaris dinas, Kepala bidang dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan promosi pariwisata budaya barapan Kebo oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan indikator implementasi Kebijakan menurut Edward III yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Sedangkan faktor penghambat adalah regulasi, pengembangan jaringan dan pendanaan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan didukung oleh : 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Sedangkan faktor penghambat adalah regulasi, pengembangan jaringan dan pendanaan.

Kata Kunci: Implentasi Kebijakan; Promosi Wisata; Budaya Barapan Kebo.

ABSTRACT

Karapan buffalo is very unique and interesting, so it is worthy of being used as a tourism destination to attract tourists to come and watch the event so that it can increase regional opinion through the tourism sector. The aims of this research are 1) To describe the implementation of the Barapan Kebo Cultural Tourism Promotion Policy by the Sumbawa Regency Regional Government, 2) To describe the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Barapan Kebo Cultural Tourism Promotion Policy by the Sumbawa Regency Regional Government. This research uses descriptive research with a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation and documentation, with key informants such as the Head of the Tourism Service, Service Secretary, Head of Division and community leaders. The results of the research show that the implementation of the Barapan Kebo cultural tourism promotion policy by the Regency Government is in accordance with the policy implementation indicators according to Edward III, namely: 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, 4) Bureaucratic Structure. Meanwhile, inhibiting factors are regulations, network development and funding. Thus, it can be concluded that policy implementation is supported by: 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, 4) Bureaucratic Structure. Meanwhile, inhibiting factors are regulations, network development and funding.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Promotion, Buffalo Karapan Culture.

1. PENDAHULUAN

Karapan kerbau hanya ada di Kabupaten Sumbawa karena merupakan tradisi dan adat istiadat yang turun temurun yang bertujuan selain merupakan lomba atau tontonan yang mengasyikan sebelum waktu menanam padi juga mempunyai nilai filosofis untuk menggemburkan tanah pertanian sehingga dapat meningkat jumlah produksi padi pada daerah atau wilayah dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Karena karapan kerbau sangat unik dan menarik maka layak untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata untuk menarik wisata untuk datang dan menyaksikan acara tersebut sehingga dapat meningkat pendapat daerah melalui sektor pariwisata. Selama ini kegiatan atau karapan kerbau masih bersifat tradisi dan adat istiadat serta budaya di kabupaten Sumbawa sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan daerah disektor pariwisata karena belum dijadikan sebagai agenda yang teratur dan sistematis sebagai kegiatan untuk menarik wisatawan. Agar kegiatan tersebut dapat menjadi agenda pariwisata daerah maka diperlukan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Implementasi kebijakan Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mengangkat topik penelitian tesis sebagai berikut : “Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Budaya Barapan Kebo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa”.

A. Landasan Konsep

1) Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Tachjan (dalam Iskandar, 2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Lebih lanjut, Tachjan (dalam Iskandar, 2017) menjelaskan tentang unsur- unsur dari pelaksanaan kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu; 1) unsur pelaksana, 2) adanya program yang dilaksanakan, dan 3) target grup atau kelompok sasaran. Menurut Dimock & Dimock (dalam Iskandar, 2017), unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan sebagai berikut: “Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan Ripley dan Franklin (dalam Iskandar, 2017) yaitu unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam pelaksanaan kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan- tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Terry (dalam Iskandar, 2017) bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan unruk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan

kebijakan publik yang menjadi acuannya (Kusumanegara, 2010). Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersarna-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

2) Promosi

Merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimanapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Menurut Tjiptono(2008:219) pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

3) Pariwisata

Menurut Krapt dan Hunziker (dalam Yoeti, 2008), pariwisata adalah keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan dalam sebuah perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. |Orang asing| dalam hal ini bukan hanya orang dari luar negeri, tapi juga orang dari luar daerah yang menjadi destinasi wisata.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan |wisata| adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka “waktu sementara”. Dalam “waktu sementara” menjadi titik tekan untuk menggambarkan ada intensitas waktu tertentu bagi wisatawan, sehingga orang yang pindah untuk menetap di daerah lain tentu bukan masuk dalam definisi wisatawan.

4) Jenis dan Pengembangan Kepariwisataaan

Jenis-jenis Wisata Menurut Suryadana dan Octavia (2015:32), wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: 1. Wisata alam, yang terdiri dari: a. Wisata pantai (*Marine tourism*) Merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum b. Wisata etnik (*Ethnic tourism*) Merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik. c. Wisata cagar alam (*Ecotourism*) Merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (*margasatwa*) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain d. Wisata buru Merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Kaitan Strategi Promosi dan Pengembangan Pariwisata Dalam usaha menarik wisatawan untuk datang ke sebuah objek wisata di suatu daerah pastinya dibutuhkan strategi promosi yang baik.

5) Barapan Kebo

Barapan kebo adalah event tradisional para *sandro*, Joki dan Kerbau terbagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo tidak hanya diselenggarakan di Pamulung akan tetapi eksis juga di Desa Moyo Hulu, Desa Senampar, Desa Poto, Desa Lengas, Desa Batu Bangka, Desa Maronge hingga Desa Utan sebagai event budaya khas Sumbawa. Barapan Kebo atau Karapan Kerbau ala Sumbawa ini diselenggarakan pada awal musim tanam padi. Lokasi atau arena Barapan Kebo adalah sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Perlakuan pemilik kerbau jargon Barapan Kebo sama seperti perlakuan audisi Main Jaran. Kerbau-kerbau peserta dikumpulkan

3 hari atau 4 hari sebelum event budaya ini digelar, untuk diukur tinggi dan usianya. Hal ini dimaksudkan, agar dapat ditentukan dalam kelas apa kerbau-kerbau tersebut dapat dilombakan. Durasi atau lamanya event adalah ditentukan dari seberapa banyak jargon Kerbau yang ikut dalam event budaya Barapan Kebo.

Hal-hal yang membuat jauh berbeda dari Karapan Sapi Madura atau Mekepong di Bali adalah pentas para sandro adu ilmu, dan para joki adu kumbar, saat "Sakak" tongkat magis Sandro Penghalang dapat tersentuh oleh kekuatan lari sang kerbau dengan bantuan Sandro back-up joki dan kerbau peserta. Pasangan kerbau yang berhasil meraih juara adalah pasangan kerbau tercepat mencapai tujuan sekaligus dapat menyentuh atau menjatuhkan kayu pancang tanda finish yang disebut dengan Sakak. Selain itu istilah-istilah yang digunakan pada aksesoris dan moment budaya Barapan Kebo juga tak kalah unik, diantaranya adalah :

- Noga : adalah kayu penjepit leher penyatu sepasang jargon Barapan.
- Kareng : adalah tempat berdiri atau bilah pijakan kaki sang joki barapan yang dirakit berbentuk segitiga.
- Mangkar : adalah pelecut atau pecut pemacu kerbau Jargon.
- Sandro : adalah Sebutan untuk orang-orang sakti dengan ilmu supranatural ala sumbawa yang dimiliki dengan pakaian khas berwarna serba hitam.
- Lawas : adalah lantunan syair pantun daerah sumbawa yang dilakukan diantara terikan kemenangan sang joki, saat kerbaunya mampu menyentuh dan menjatuhkan tanpa sedikitpun terjatuh dari kareng-nya.
- Ngumang : adalah sesumbar kemenangan sebagai pemikat wanita penonton barapan dan merayu-rayu dengan lantunan lawas yang dikuasainya.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara menyajikan data secara faktual dan akurat mengenai fakta – fakta riil yang ada dilapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data melalui observasi. Wawancara dan dokumentasi, analisis data dengan Reduksi, Display dan pengambilan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Budaya Barapan Kebo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa

a) Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata dan olah raga Kabupaten Sumbawa mensosialisasikan tentang Implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan olah raga dalam pengembangan Objek wisata khususnya Objek wisata Karapan Kerbau kepada masyarakat dan pengunjung objek wisata karapan kerbau, sebagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah-wilayah yang mempunyai nilai wisata, kegiatan promosi tentunya salah satu langkah dari bagian pengembangan suatu daerah. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 3 indikator komunikasi yaitu: Koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri dan pembuatan papan informasi pariwisata Kab/ Provinsi Transmisi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyaluran informasi mengenai suatu hal dari Kepala Dinas Pariwisata ke kepala bidang bagian pariwisata dan kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan objek wisata Budaya Barapan Kerbau, transmisi komunikasi disalurkan melalui proses penyaluran informasi dari Kepala Dinas Pariwisata kepada Kepala Bagian melalui rapat koordinasi antar bidang. Sosialisasi dalam pengembangan objek wisata Budaya Barapan Kerbau kepada masyarakat dilakukan di setiap Desa wisata termasuk lewat kegiatan (PNPM Mandiri), kegiatan ini baru dilakukan satu kali pada tahun tersebut, dan sosialisasi secara tidak langsung seperti pemanfaatan pamflet, baliho dan sebagainya, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Oleh karena itu Dinas Pariwisata sebaiknya melakukan sosialisasi secara langsung dengan rutin/ terus-menerus kepada masyarakat. Kejelasan informasi

berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi antara Kepala Dinas Pariwisata selaku pembuat kebijakan dan bagian-bagiannya serta masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Sosialisasi promosi wisata dalam rangka pengembangan objek wisata Budaya Karapan Kerbau sangat berpengaruh kepada kemampuan Dinas Pariwisata dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, Dari sisi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan olah raga Kabupaten Sumbawa tidak lepas dari lingkup promosi.

b) Sumber Daya

Organisasi atau orang yang menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud terbagi 4 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Staf dalam konteks penelitian ini adalah staf dari dinas pariwisata yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Budaya Karapan kerbau. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Budaya Karapan kerbau, Dinas Pariwisata dan olah raga memiliki staf yang berjumlah 22 staf untuk bidang pariwisata terdapat 5 staf dan dibantu oleh Sketariat yang terdiri dari tenaga honorer. Sumberdaya dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada sumberdaya manusia saja, namun juga dibarengi dengan kelengkapan informasi, fasilitas dan infrastruktur, jaringan dan sebagainya. Dibawah ini dijelaskan jenis – jenis sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan wisata budaya karapan kerbau di Kabupaten Sumbawa.

c) Disposisi

Kecendrungan atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pariwisata berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Karena sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal. Oleh karena itu staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Sikap positif yang ditunjukkan berdasarkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah Kepala Dinas. Sedangkan sifat negatif cenderung malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap perintah Kepala Dinas Pariwisata.

d) Struktur Birokrasi

Struktur didefinisikan sebagai pola hubungan di antara elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi di mana mereka berada (Hatch, 1997, dalam Kusdi, 2009). Struktur organisasi merupakan faktor penting dalam berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana organisasi berelasi untuk bisa menggapai tujuantujuan yang diinginkan. Agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu: kejelasan tupoksi dan SOP. Menurut Edwards, dua karakter birokrasi adalah prosedur kerja standard dan fragmentasi Prosedur kerja standard berkaitan dengan sistem kerja dari organisasi pelaksana yang tersusun sebagai pemandu dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Terminologi prosedur kerja yang banyak dipakai saat ini adalah prosedur operasional standard (Standard Operating Procedure/SOP).

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan olah raga dalam pengembangan objek wisata budaya karapan kerbau yang dilihat dari ke 4 (empat) indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut:

- a) Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata karapan kerbau belum optimal, karena bentuk promosi yang digunakan masih sangat terbatas, masih pada sektor internal saja berupa spanduk dan papan baleho, sementara promosi keluar daerah maupun pada kancan internasional masih sangat terbatas.

- b) Sumberdaya di Dinas Pariwisata dan olah raga terlebih khusus di bidang pariwisata dapat di simpulkan belum optimal, karena minimnya anggaran yang digunakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata terutama kesediaan sarana dan prasarana yang tersedia pada objek wisata budaya karapan kerbau, belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta terutama bidang perhotelan, sehingga tempat menginap bagi wisatawan di Luar Kabupaten Sumbawa masih sangat terbatas.
- c) Sikap Pelaksana di Dinas Pariwisata dan olah raga dapat disimpulkan belum optimal dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan event budaya karapan kerbau, sebagian masyarakat beranggapan pelaksanaan event budaya karapan kerbau ini merupakan tugas pemerintah, padahal event budaya pacu jalu merupakan event besar yang sudah ada sejak turun temurun.

Struktur Birokrasi di Dinas Pariwisata dan olah raga dapat disimpulkan belum optimal karena belum ada SOP yang mengatur pelaksanaan event budaya karapan kerbau dan belum tersedianya papan – papan informasi yang memberikan informasi kepada pengunjung wisata budaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- AG,. Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Anas, Abdullah Azwar, 2013. *Ekowisata, Masa Depan Pariwisata Kita*. Dimuat di Jawa Pos, 22 Mei 2013.
- Arieta, Siti, 2010. *Community Based Tourism pada Masyarakat Pesisir: Dampaknya terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi*. Jurnal Dinamika Maritim, Vol. 2. No.1 September 2010.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin, 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum. FH UII Yogyakarta.
- Bayu Suryaningrat. 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru: Jakarta.
- Breugel, Liedewij van, 2013. *Community Based Tourism: Local Participation and Perceived Impacts*. Faculty of Social Sciences Radboud University Nijmegen.
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Medio Presindo.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. (2018). *Kajian Prospektif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2018*. Garut: DisparbudKabupaten Garut.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua ed.)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. Jakarta: PT Gravindo Persada.

Franciscus Van Ylst. 2008. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. UI : Depok. Hal 6 Garna.

Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta : Rineka Cipta.